

ANALISIS PENOLAKAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Astin Julia Rosa (1910413077)

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

astinjr@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Pemindahan ibu kota negara bukan merupakan hal yang baru, sebab Indonesia telah merencanakan pemindahan ibu kota negara sejak era pemerintahan Presiden Soeharto hingga pada akhirnya di era pemerintahan Joko Widodo rencana tersebut direalisasikan. Penelitian pada skripsi ini mengkaji mengenai penolakan yang disampaikan oleh PKS sebagai partai oposisi di masa pemerintahan Joko Widodo terhadap agenda pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Pada penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Partai Keadilan Sejahtera sebagai bagian dari partai oposisi terhadap kebijakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara telah menjadikan Partai Keadilan Sejahtera sebagai penyeimbang kekuatan politik serta kontrol sosial di parlemen. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung kepada narasumber serta melakukan observasi. Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang diteliti yakni anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, LSM Walhi, serta masyarakat lokal yang bermukim di lokasi pembangunan IKN Nusantara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori oposisi yang disampaikan oleh Robert Dahl serta konsep *zero sum game* karya Erika S. Olson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan yang dilakukan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap pemindahan ibu kota negara telah memperkuat posisi PKS sebagai partai oposisi satu-satunya serta penyeimbang kekuatan politik di era pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada era pasca reformasi. Selain itu juga, fungsi kontrol sosial dalam kebijakan pemindahan IKN, PKS mengungkapkan berbagai alasan penolakan salah satunya mengenai anggaran yang sangat besar pada proses pembangunan IKN yang mencapai 5 tahapan hingga tahun 2045. Disamping itu juga, PKS menilai jika Hak Atas Masyarakat Adat tidak ditemukan pada RUU IKN hingga telah disahkannya menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Selain itu, fungsi penyeimbang kekuatan politik yang dimiliki PKS belum dilaksanakan secara stabil sebab rendahnya parpol yang menjadi bagian dari oposisi telah membuat PKS mengalami kekurangan suara pada setiap pemungutan suara mengenai suatu kebijakan terutama pada kebijakan pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara

Kata kunci: PKS, Oposisi, Kontrol Sosial, IKN Nusantara, Penyeimbang Kekuatan

ANALYSIS OF THE JUSTICE PROSPEROUS PARTY'S (PKS) REFUSAL TO THE MOVING OF THE NATION'S CAPITAL

Astin Julia Rosa (1910413077)
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
astinjr@upnvj.ac.id

ABSTRACT

Moving the nation's capital is not something new, because Indonesia has been planning to move the nation's capital since the era of President Soeharto's administration until finally in the era of Joko Widodo's administration the plan was realized. The research in this thesis examines the rejection conveyed by PKS as an opposition party during the Joko Widodo administration towards the agenda of moving the country's capital to East Kalimantan Province. This research also aims to analyze how the role of the Prosperous Justice Party as part of the opposition party regarding the policies of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital has made the Prosperous Justice Party a balancer of political power and social control in parliament. This thesis uses qualitative research methods, by collecting data through direct interviews with sources and making observations. In this research, the research subjects studied were council members from the Prosperous Justice Party faction, Walhi NGO, as well as local communities who live at the IKN Nusantara construction site. The theory used in this research is the opposition theory presented by Robert Dahl and the zero sum game concept by Erika S. Olson. The research results show that the rejection by the Prosperous Justice Party faction of the relocation of the country's capital has strengthened PKS's position as the only opposition party and a balancer of political power in the Joko Widodo and Ma'ruf Amin administration era in the post-reformation era. Apart from that, the social control function in the IKN transfer policy, PKS revealed various reasons for rejection, one of which was regarding the very large budget for the IKN development process which reached 5 stages until 2045. Apart from that, PKS assessed that the Rights of Indigenous Peoples were not found in The IKN Bill until it has been passed into Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. Apart from that, the function of balancing political power that PKS has has not been implemented stably because the low number of political parties that are part of the opposition has made PKS experience a lack of votes in every vote on a policy, especially on the policy of moving the country's capital to IKN Nusantara.

Keywords: *PKS, Opposition, Social Control, IKN Nusantara, Balancing Power*